

RENCANA KERJA

T.A 2025



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Biro Kesejahteraan Rakyat merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Rencana Pembangunan Daerah (2024-2026), yang diwujudkan melalui program Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025;
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025. Ini merupakan tahun kedua periode Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2026 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 merupakan penjabaran RPD Periode 2024 - 2026. Renja OPD digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Renja ini menguraikan lebih rinci tentang kegiatan yang

akan dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. SulSel tahun 2025.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Visi dan Misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2018-2023, Sulawesi Selatan memiliki visi **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**, dengan misi sebagai berikut :

- 1) Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
- 2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
- 3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
- 4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
- 5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel pada tahun 2023 melaksanakan 2 program dan 11 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan rata-rata capaian kinerja program sebesar 99,71%.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggambarkan capaian kinerja sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023. Adapun uraian kinerja menurut sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatkan bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Pembangunan Manusia yang kompetitif dan inklusif, dan tujuan "Meningkatkan rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan kualitas SDM yang berkarakter". Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% ketersediaan bahan pendukung kebijakan bidang kesra yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	9 dok	8 dok	88,89 %
Rata-rata Capaian				88,89 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran strategis 1 yaitu : **“Meningkatkan bahan pendukung dalam rangka penanganan kesejahteraan rakyat berlandaskan nilai-nilai agama”**, dengan realisasi capaian kinerja yaitu 88,89 % sehingga capaian kinerja sasaran strategis 1 ini tercapai dengan kriteria **tinggi**.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	% ketersediaan bahan pendukung kebijakan bidang kesra yang dimanfaatkan bagi Pimpinan	8 dok	8 dok	8 Dok

Berdasarkan uraian indikator kinerja yang ada pada Sasaran 1, persentase capaian adalah 88,89 % dengan penjelasan sebagai berikut,

pencapaian rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara 88,89 %, dengan melaksanakan berbagai kebijakan di bidang :

1. Bidang Mental dan Spritual, dapat tercapai 100 persen.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan dasar, dapat tercapai 100 persen.
3. Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, tidak dapat tercapai 100 persen.

Dari uraian diatas rata-rata capaian indikator untuk sasaran pertama adalah 88,89 persen.

Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Target dari realisasi indikator keberhasilan tercapainya sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian
1.	% Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85 %	100 %	98,47 %
2.	Nilai Sakip Perangkat Daerah	80,00 (BB)	80,25	100,3 %
3.	% Tindak Lanjut Hasil Temuan LHP (Temuan Bahan Material)	99,99 %	100 %	100%

Untuk indikator pertama yaitu persen capaian kinerja perangkat daerah dapat dicapai sebesar 98,47 %. Dalam perolehan capaian indikator kinerja untuk sasaran pertama dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan administrasi perkantoran berjalan dengan baik.
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dapat tercapai dengan baik.
3. Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu berjalan sesuai yang diharapkan berupa Penyusunan RKA, RKAP, DPA, DPPA, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja

(RENJA), Perubahan RENJA, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) dan Laporan Akhir Tahun.

4. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi bidang mental dan spritual dapat berjalan dengan baik, meskipun dalam penyaluran dana hibah bidang mental dan spritual tidak dapat dicapai sepenuhnya disebabkan Lembaga calon penerima hibah tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam proses pencairan
5. Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dapat berjalan dengan baik, meskipun dalam penyaluran dana hibah Pendidikan tidak dapat dicapai sepenuhnya disebabkan Lembaga calon penerima hibah tidak dapat melengkapi dokumen yang disyaratkan dalam proses pencairan.
6. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar dapat berjalan dengan baik, meskipun terdapat kebijakan terkait hibah penerbangan yang belum dapat ditindaklanjuti.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	
		2023	Target Jangka Menengah
1.	% Capaian Kinerja Perangkat Daerah	98,47 %	100 %

Untuk indikator kedua yaitu nilai SAKIP perangkat daerah tahun 2022 sampai Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil meraih poin sebesar 80,25 atau Sangat Baik (A).

Untuk indikator ketiga yaitu persen tindak lanjut hasil temuan LHP (Temuan Bahan Material) tahun 2022 dapat dicapai 100 %, dalam menjalankan tupoksinya Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 telah melakukan 1 kali pemeriksaan regular untuk tahun 2022, dari LHP masih terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD 2022	Realisasi Renja PD 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah rumusan kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	9,0	9,0	9,0	8,0	88,89	9,0	9,0	100
		Persentase Penduduk usia 15 tahun ke atas beragama Islam yang melek aksara AlQuran (Prioritas)	35,75	35,25	35,25	39,22	111,26	35,50	35,50	100
		Jumlah kasus Kejahatan terhadap Kesusilaan (Prioritas)	10,0	10,0	10,0	43,93	439,30	10,0	10,0	100
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	% kebijakan pembinaan spritual yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sarana dan prasarana spritual yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		% permohonan hibah sarana dan prasarana spritual yang ditindaklanjuti	100,0	100,0	100,0	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0

	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sarana dan prasarana spritual	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kelembagaan bina spritual yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% permohonan bantuan hibah lembaga bina spritual yang ditindaklanjuti	100,0	100,0	100,0	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kelembagaan bina spritual	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						<i>92,50</i>			
<i>Predikat Kinerja</i>									
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fasilitasi Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang pendidikan yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pendidikan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% Dana Hibah Pendidikan yang disalurkan	100,0	100,0	100,0	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0
Fasilitasi Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kesehatan yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan	100,0	100,0	100,0	70,0	70,0	100,0	100,0	100,0

Fasilitasi Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang sosial, Infrastruktur, Ketentraman, Dan Ketertiban Umum	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						93,57			
<i>Predikat Kinerja</i>									
Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	% kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	% rumusan kebijakan Kesejahteraan Rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Transmigrasi dan Tenaga Kerja	% rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

	admnrstrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, transmigrasi dan tenaga kerja								
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi Informatika Statistik Persandian dan Perhubungan	% rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan yang dimanfaatkan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	% pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						100,0			
<i>Predikat Kinerja</i>									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100,0	100,0	100,0	85,0	85,0	100,0	100,0	100,0
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100,0	98,0	98,0	95,53	97,48	99,0	99,0	99,0
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	85,0	84,0	84,0	100,0	119,05	85,0	85,0	85,0
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	6,0	2,0	2,0	2,0	100,0	1,0	1,0	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	3,0	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	3,0	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100

Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	3,0	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang disusun	3,0	1,0	1,0	1,0	100,0	1,0	1,0	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	6,0	2,0	2,0	2,0	100,0	1,0	1,0	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang disusun	12,0	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						100,0	100,0	100,0	100,0
<i>Predikat Kinerja</i>							18,0	18,0	18,0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	% pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi yang tersusun	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang tersaji	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	% Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,0	100,0	100,0	80,0	80,0	1,0	1,0	1,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersaji	18,0	18,0	18,0	18,0	100,0	30,0	30,0	30,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						80,0			

<i>Predikat Kinerja</i>									
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai ASN yang terkumpul	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	5,0	5,0	5,0
	Jumlah Tenaga Non ASN	1,0	1,0	1,0	1,0	100,0	15,0	15,0	15,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						<i>40,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Predikat Kinerja</i>									
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	50,0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	34,0	34,0	34,0	34,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Barang Logistik yang tersedia	45,0	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2,0	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang tersedia	5,0	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas	130,0	60,0	60,0	49,0	81,67	100,0	100,0	100,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						<i>72,71</i>	100,0	100,0	100,0
<i>Predikat Kinerja</i>									
							12,0	12,0	12,0

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	12,0	12,0	12,0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	12,0
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Ketersediaan Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	12,0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,0	12,0	12,0	12,0	100,0	12,0	12,0	12,0
<i>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</i>						<i>100,0</i>	100,0	100,0	100,0
<i>Predikat Kinerja</i>							10,0	10,0	10,0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100,0	100,0	100,0	65,0	65,0	9,0	9,0	9,0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang dipelihara	10,0	10,0	10,0	10,0	100,0	35,50	35,50	35,50
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	1,0	2,0	2,0	1,0	50,0	10,0	10,0	10,0

2.3 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas mengenai pencapaian kinerja dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel hingga tahun 2023, dimana terdapat 2 program dan 9 kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan presentase realisasi anggaran rata-rata sebesar 100 % dengan predikat “sangat baik” dan relisasi fisik sebesar 99,75 % dengan predikat “sangat baik”. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel telah mampu melaksanakan tupoksinya yang melekat pada program dan kegiatan tersebut, baik dalam hal keuangan maupun pencapaian sasaran-sasaran yakni :

1. Administrasi perkantoran terlaksana dengan baik;
2. Peningkatan kapasitas SDM Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel;
3. Meningkatnya koordinasi antara Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pembangunan bidang kesejahteraan di Sulawesi Selatan;

Namun demikian, tentunya masih ada hal yang perlu mendapat perbaikan dan peningkatan, dalam upaya mewujudkan tercapainya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih. Beberapa permasalahan yang ada maupun yang berpotensi muncul di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan dan kinerja yang masiah perlu ditingkatkan, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas dari dokumen tersebut.

2. Tingkat partisipasi stake holder lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel dalam proses perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang belum optimal.
3. Banyaknya system informasi/aplikasi yang digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan keuangan maupun barang milik daerah mengakibatkan kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian data/informasi antar dokumen yang dihasilkan serta waktu yang tidak efektif.
4. Percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat masih perlu ditingkatkan;

Menyikapi permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan kebijakan dan langkah strategis yang tentunya berpedoman pada fungsi dan wewenang Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel, dengan melakukan analisis terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin terjadi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, program kegiatan yang dicantumkan telah sesuai dengan perencanaan awal yang telah diusulkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel, baik dari segi jumlah program dan kegiatan, lokasi kegiatan, target indicator kinerja, serta pagu indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Program sebanyak 2 Program, yang terdiri atas 11 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang merupakan kesatuan dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah Prov. Sulsel.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk tahun 2025 terdapat usulan masyarakat yang berasal dari Aspirasi masyarakat melalui Musrembang diberbagai tingkat, dimana usulan dimaksud berupa usulan pemberian bantuan hibah untuk beberapa sarana keagamaan dengan jumlah usulan yang masuk sebanyak 46 usulan, usulan tersebut diusulkan melalui aplikasi SIPD, berupa permintaan bantuan hibah sarana keagamaan, Lembaga keagamaan dan Lembaga Pendidikan.

Usulan-usulan dimaksud akan diverifikasi lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku usulan selanjutnya dimasukkan sebagai daftar calon nominatif penerima bantuan hibah tahun 2025.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama OPD/Unit Kerja : Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	PERMASALAHAN	KELOMPOK SASARAN	KETERANGAN	ASUMSI	LOKASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Penyediaan Fasilitas: Membantu membangun atau meningkatkan fasilitas pendidikan PAUD, termasuk ruang kelas yang aman dan nyaman, perpustakaan, area bermain, dan fasilitas sanitasi yang memadai.	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	
2.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan Sarana dan Prasarana Masjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	

3.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Rehab Mesjid SMP 1 Maros, mesjid Al ilmi Akbar.	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	
4.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan Hibah Mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan	
5.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai di Universitas Akademi Sekretari Manajemen Indonesia (ASMI)	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Kel. Maccini, Kec. Maccini, Provinsi Sulawesi Selatan	

6.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan Dana Hibah Mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan	
7.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Perlunya pengembangan kegiatan spiritual salah satunya lewat Nahdlatul Ulama	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Jl Darul Maarif , Provinsi Sulawesi Selatan	
8.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Pelatihan Guru Mengaji Kota Makassar	Masyarakat		dalam penyusunan RAB memperhatikan standar satuan harga yang berlaku	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
9.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Pelatihan Guru Mengaji Kabupaten Gowa	Masyarakat		dalam penyusunan RAB memperhatikan standar satuan harga yang berlaku	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	

10.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Pelatihan Guru Mengaji Kabupaten Takalar	Masyarakat		dalam penyusunan RAB memperhatikan standar satuan harga yang berlaku	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
11.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Pelatihan Guru Mengaji Kabupaten Jeneponto	Masyarakat		dalam penyusunan RAB memperhatikan standar satuan harga yang berlaku	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
12.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Pelatihan Guru Mengaji Kabupaten Bantaeng	Masyarakat		dalam penyusunan RAB memperhatikan standar satuan harga yang berlaku	Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
13.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	dibutuhkan bantuan hibah untuk pembangunan Sarana Pendidikan dan keagamaan di Yayasan Quranic Forum Maros	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	kecamatan mandai, Provinsi Sulawesi Selatan	
14.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Yayasan Anak unggul Dambaan Ibu Kab. Maros membutuhkan bantuan hibah untuk menunjang kegiatan pengembangan spritual dan pendidikan	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-	maros, Provinsi Sulawesi Selatan	

						undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas		
15.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	mesjid Nurul Amin Buttatoa membutuhkan bantuan renovasi mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	kecamatan turikale, Provinsi Sulawesi Selatan	
16.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan Hibah Mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	1. Mesjid Desa Harapan Kec. Malili 2. Mesjid Lakawali Kec. Malili 3 Mesjid Kalaena Kiri Kec. Kalena 4. Mesjid Desa Ussu Kec. Malili, Provinsi Sulawesi Selatan	
17.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-	mesjid abdul rahman matiro deceng, Provinsi Sulawesi Selatan	

						undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas		
18.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid nurul jihad tamaona , Provinsi Sulawesi Selatan	
19.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid darussalam borong rapoa , Provinsi Sulawesi Selatan	
20.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-	mesjid al biru kel matekko, Provinsi Sulawesi Selatan	

						undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas		
21.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid babuttaqwa anrihua , Provinsi Sulawesi Selatan	
22.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid rodatul janna togambang , Provinsi Sulawesi Selatan	
23.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-	mesjid babutauba desa balibo, Provinsi Sulawesi Selatan	

						undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas		
24.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid nurul islam desa benteng gattareng, Provinsi Sulawesi Selatan	
25.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Perlunya Program Bantuan Hibah Sarana Prasarana Spritual Dalam Menunjang Kenyamanan Pelaksanaan Peribadatan	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Jalan Perumnas Sudiang, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya, Provinsi Sulawesi Selatan	
26.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Perlunya Program Bantuan Hibah Bagi Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Bagi Peserta Didik dan Seluruh Civitas Akademika	Masyarakat		-	Jalan Dg. Tata Komp. Hartaco Indah, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Provinsi Sulawesi Selatan	

27.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan Pembangunan Gereja Pintu Elok	Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas 	Jl. Dirgantara Kelurahan Paropo Kec. Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
28.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan Pembangunan Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar 1 BPMJ Jordan	Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas 	Kelurahan Paropo Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
29.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Gereja Toraja Jemaat Bukit Tamalanrea	Masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas 	Jl. Perintis Kemerdekaan VI Lorong 9 Komp. SMU Soleman Kel. Tamalanrea Jaya Ke. Tamalanrea Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	

30.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Menambah fasilitas pendidikan	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
31.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan sarana mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	
32.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	adanya sarana ibadah (Masjid) yang membutuhkan bantuan untuk pembangunannya	Masyarakat		-	Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan	
33.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-	mesjid syuhada 45 caile, Provinsi Sulawesi Selatan	

						undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas		
34.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid nurul jihat bonto malengo, Provinsi Sulawesi Selatan	
35.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid nurul imam desa malewang , Provinsi Sulawesi Selatan	
36.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-	mesjid darul munawarah tanah kokong , Provinsi Sulawesi Selatan	

						undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas		
37.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid jami nurul falah bontomasila , Provinsi Sulawesi Selatan	
38.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Perbaiki sarana Ibadah/Masjid Nur Rahmah agar Jamaah lebih nyaman beribadah	Masyarakat		Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jl. Borong Raya Lr.4 RW.11, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Provinsi Sulawesi Selatan	
39.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Perbaiki sarana dan prasarana Masjid Miftahul Jannah, agar jamaah lebih khusu beribadah	Masyarakat		Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jl. Batua Raya 5 RW.7, Kelurahan Batua, kecamatan Manggala , Provinsi Sulawesi Selatan	

40.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Perbaiki Sarana dan Prasarana Masjid Al Mubarak	Masyarakat		Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jl. Toddopuli 18 Baru RT.01/RW.10 Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Provinsi Sulawesi Selatan	
41.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Rehabilitas Sarana dan Prasarana Masjid Nurul Yaqin	Masyarakat		Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jl. Dg. Hayo No.70 Pattunuang, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Provinsi Sulawesi Selatan	
42.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Rehabilitasi sarana dan prasarana Masjid At Thoybah	Masyarakat		Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jl. Swadaya Mas, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Provinsi Sulawesi Selatan	
43.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Rebalitasi Sarana dan Prasarana Masjid Babussalam	Masyarakat		Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan	Jl. S. Daeng Katti RT.02/RW.03, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala,	

						perundang-undangan yang berlaku	Provinsi Sulawesi Selatan	
44.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	Bantuan Hibah masjid Lektobarak	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	Desa Parombean, Provinsi Sulawesi Selatan	
45.	Program Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spritual	bantuan keuangan mesjid	Masyarakat		- Setiap usulan akan diakomodir dalam RKA apabila telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - nama dan alamat objek harus jelas	mesjid annur bukit tinggi , Provinsi Sulawesi Selatan	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerapan pelayanan koordinasi yang terpadu, menyangkut dengan Kepemudaan, Keolahragaan, Pendidikan dan Seni Budaya, Kesejahteraan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Keagamaan;
- b. Efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yang berkaitan dengan Kepemudaan, Keolahragaan, Pendidikan dan Seni Budaya, Kesejahteraan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Keagamaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah tidak lepas dari peran serta segala unsur yang ada dalam pemerintahan serta keterlibatan masyarakat. Perangkat daerah sebagai unsur pembantu pemerintah daerah berkewajiban mendukung pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah melalui penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang berkorelasi satu sama lain.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2024 – 2026 memiliki tujuan strategis “Optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”.

Tujuan strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelayanan Sekretariat Daerah di bidang ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan indikator sasaran :
 - a. Cakupan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pelayanan di bidang kesejahteraan rakyat.
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah, dengan indikator sasaran :
 - a. Nilai Sakip OPD
 - b. Persentase Nilai SKP Kategori Baik
 - c. Rata-rata cakupan kinerja perangkat daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)

3.3 Program dan Kegiatan

Pada RKPD tahun 2025, terdapat 2 Program dan 11 Kegiatan dan 39 sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel, dengan rincian sebagai berikut :

1. 8 (delapan) kegiatan Pendukung/Umum, berisi sekumpulan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan program teknis tersebut diatas, yang banyak terkait dengan kegiatan perencanaan, keuangan dan ketatausahaan/umum, sebagai berikut :
 - 1) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2 Sub Kegiatan);
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (3 sub kegiatan);
 - 3) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (5 sub kegiatan);
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah (7 Sub Kegiatan);

- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2 Sub Kegiatan);
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 Sub Kegiatan);
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (4 Sub Kegiatan);
 - 8) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (6 Sub Kegiatan);
2. 3 (tiga) kegiatan Teknis, berisi kegiatan-kegiatan teknis yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel :
- 1) Fasilitasi Pembinaan Mental dan Spritual (2 sub kegiatan);
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (3 Sub Kegiatan);
 - 3) Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (3 Sub Kegiatan);

Kedua kelompok program tersebut saling mendukung satu sama lain untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel tahun 2025.

Tabel T-C 33
Rancangan Akhir RENJA
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah: Biro Kesejahteraan Rakyat

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASI ONAL	DAERA H				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT						123.959.309.575,00							74.267.862.678,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH AN						123.959.309.575,00							74.267.862.678,00	
4.01	SEKRETARIA T DAERAH						123.959.309.575,00							74.267.862.678,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	-	-			-	2.304.722.335,00						-	3.840.000.000,00	

4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %			-	224.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 %	330.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

		<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

		<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				5 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	120 laporan			-	125.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	120 laporan	170.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				5 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		60.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		20.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

		<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		10.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	49.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	160.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
		<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				45 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	9.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				15 Orang	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	455.790.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	625.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	10.000.000,00	Kota Makassar, Panakkukang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	6.000.000,00	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				40 Laporan	315.790.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		400.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>				12 Dokumen	14.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		15.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	230.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				3 Paket	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				6 Unit	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		200.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.07.0008															

		<i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penنگatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		300.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.070.722.335,00			-	01. Penنگatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	1.375.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	20.000.000,00	Kota Makassar, Panakkang, Panaikang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penنگatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang	-		50.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	660.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		800.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	110.210.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	-	280.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	90.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				10 Unit	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-		30.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-			-	121.654.587.240,00						-	70.427.862.678,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	-	100 %			-	23.330.587.240,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 %	57.597.862.678,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual														
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola</i>	3 Unit			3 Unit	1.044.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	3 Unit	5.000.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual														

		<i>Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi</i>	730 Lembaga			150 Lembaga	22.286.587.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	280 Lembaga	52.597.862.678,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	-	100 %			-	78.125.000.000,00			-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 %	12.080.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	77.625.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAA NN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	11.580.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan														

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	450.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	-	100 %			-	20.199.000.000,00			-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 %	750.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata														

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	74.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01.Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

		Tenaga Kerja													
4.01.04.1.03 .0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	3 Dokumen			1 Dokumen	20.075.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	250.000.000,00	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
J U M L A H							123.959.309.575,00							74.267.862.678,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Rencana Kerja

Seperti telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa pada RPKD tahun 2025, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel telah merencanakan pelaksanaan 2 Program dan 11 Kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 123.959.309.575,-. Program dan kegiatan ini menjadi instrument penting dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel. Selanjutnya untuk menilai apakah hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dicapai adalah sebuah keberhasilan atau kegagalan, maka diperlukan adanya indicator kinerja serta pendanaan yang indikatif yang menggambarkan tolak ukur kinerja / target yang diinginkan untuk masing-masing program dan kegiatan.

Indicator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan dan juga sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder.

Pendanaan indikatif merupakan wujud dari kebutuhan pendanaan yakni jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam renja.

1.2 Pendanaan

Rencana Kinerja Perubahan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel Tahun 2025 bersumber pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp.123.959.309.575,-

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2025 ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel, yang selanjutnya dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD). Olehnya itu, dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Renja ini, perlu dibangun sinergitas dan koordinasi yang baik dan berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2025, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian sasaran program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel, RENJA PD Tahun 2025 ini, merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA-PD) Tahun 2025;
2. Mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan, masing-masing bagian lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel wajib menjadikan dokumen Renja ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat dihasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan di dalam dokumen ini;

3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan, maupun kesesuaian antara target dan realisasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025.
4. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan renja secara berkala dengan melibatkan stakeholder dan membuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan sasaran pembangunan selama tahun 2025.

Berdasarkan kaidah pelaksanaan ini, diharapkan kepada seluruh bagian lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel untuk menjadi bahan perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

5.2 Penutup

Demikian Rencana Kinerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh berbagai pihak yang terkait dan kritik serta saran yang membangun demi terciptanya sasaran yang di inginkan sesuai dengan visi dan misi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025 agar dapat mendukung keberhasilan terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

Makassar, Juni 2024



PL. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

IQBAL NADJAMUDDIN, SE

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 19740701 200212 1 003